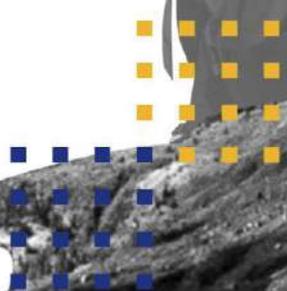


# Laporan Kinerja 2021

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani



**RINJANITE**  
The beauty of nature and culture



**Pencapaian tertinggi  
dari kebudayaan manusia  
adalah ketika ia mampu  
dan mau mewariskan  
keindahan alam  
kepada anak cucu.**

*Ir. Wiratno, M.Sc - Dirjen KSDAE  
Desa Sembalun*

Rumah Adat Semokan  
Foto : Humas BTNGR



# Kata Pengantar

## **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Tahun Anggaran 2021 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK) yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja (LKj) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tahun 2021 ini merupakan laporan tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Kepada semua pihak yang telah bekerja dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Mataram, Januari 2022  
Kepala Balai,

**Dedy Asriady, S.Si., M.P.**  
NIP. 19740818 20003 1 001



# Ringkasan eksekutif

Penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara khususnya Balai TNGR. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.169/Menlhk-II/2015 tentang penunjukan unit induk dan pembina teknis organisasi unit pelaksana teknis taman nasional maka Balai TNGR selaku unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sebagai Induk Organisasi (atasan langsung dan penanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi).



Adapun Tugas pokok Balai Taman Nasional adalah :

*“Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka seluruh kinerja balai TNGR didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang di dalam Renstra Balai TNGR .

Renstra Balai TNGR Tahun 2020 – 2024 mengacu pada Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024 disusun sebagai dasar pelaksanaan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai TNGR yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan target jangka menengah.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua Renstra Balai TNGR 2020-2024, dalam rangka mencapai sasaran strategis Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional. Balai TNGR telah menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2021. Komitmen Balai TNGR dalam mencapai sasaran strategis Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional, diwujudkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.



Adapun capaian kinerja Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) di tahun 2021 secara umum telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dibuktikan dengan capaian kinerja sebesar 119,79 %, yang masuk dalam kategori "*sangat baik atau sangat berhasil*" ada peningkatan capaian kinerja dibanding tahun 2020 sebesar 17,16%.

Terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang hendak dicapai pada tahun 2021 dengan rincian; terdapat 4 (empat) IKK memperoleh capaian kinerja "dengan dengan nilai 100% dan 6 (dua) IKK memperoleh nilai capaian kinerja dengan nilai > 100%. Dengan kategori "*sangat baik atau sangat berhasil*" dan 1 IKK memperoleh nilai <100 yakni sebesar 95,38%.

Sedangkan nilai tingkat efisiensi capaian kinerja di tahun 2021 sebesar 1,23 atau dinyatakan "Efektif".

Pencapaian seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara umum dapat berjalan dengan lancar, walaupun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan dilapangan karena adanya pandemi Covid-19, namun berkat koordinasi, kerjasama dan komitmen dari semua pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kedepan, setiap unsur dalam organisasi diharapkan dapat lebih memahami indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rencana strategis, sehingga kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja dan anggaran serta kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar sejalan dan mendukung tercapainya IKK.

---

Pagu anggaran awal TNGR pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 19.547.000.000. Pada tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan memorendum Direktorat Jenderal KSDAE nomor M.5/KSDAE/SET.3/REN.2/7/2021 TNGR mendapat mandat untuk penghematan pagu anggaran (*refocusing*) sehingga anggaran yang tersedia menjadi Rp. 16.480.546.000,- atau berkurang sebanyak Rp. 3.066.454.000 yang difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid-19.

Melalui berbagai langkah strategis dan upaya percepatan pelaksanaan anggaran, TNGR berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 97,63% atau sebesar Rp.16.089.346.473.

Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020, realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 0,12%.



---

# Daftar isi

<b>i</b>	<b>KATA PENGANTAR</b>
<b>ii</b>	RINGKASAN EKSEKUTIF
<b>v</b>	DAFTAR ISI
<b>vi</b>	DAFTAR TABEL
<b>vii</b>	DAFTAR GAMBAR
<b>viii</b>	DAFTAR LAMPIRAN
<b>1</b>	<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>
<b>1</b>	A. Latar Belakang
<b>2</b>	B. Profil Organisasi BTNGR
<b>6</b>	C. Isu Strategis dan Permasalahan Utama
<b>10</b>	<b>BAB II – PERENCANAAN KINERJA</b>
<b>10</b>	A. Rencana Strategis 2020-2024
<b>13</b>	B. Target Jangka Menengah (2020-2024)
<b>15</b>	C. Target Tahunan
<b>17</b>	<b>BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA</b>
<b>17</b>	A. Capaian Kinerja Organisasi
<b>38</b>	B. Realisasi Anggaran
<b>46</b>	<b>BAB IV – PENUTUP</b>
	<b>LAMPIRAN</b>



---

# Daftar tabel

Tabel 1	Permasalahan Utama di Taman Nasional Gunung Rinjani	7
Tabel 2	Matrik Renstra Balai Taman Nasional Gunung Rinjani	14
Tabel 3	Perjanjian Kinerja BTNGR Tahun 2020	16
Tabel 4	Pengukuran Capaian Kinerja BTNGR Tahun 2020	19
Tabel 5	Perkembangan Perubahan Zona di TNGR	22
Tabel 6	Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun 2020	38
Tabel 7	Rekapitulasi Pencapaian Realisasi Anggaran BTNGR Tahun 2020 (ber-dasarkan jenis belanja)	39
Tabel 8	Rekapitulasi Pencapaian Realisasi Anggaran BTNGR Tahun 2020 (ber-dasarkan sumber dana)	39



---

# Daftar lampiran

---

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja BTNGR Tahun 2021

---

Lampiran 2 Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021

---

Lampiran 3 Matrik Kegiatan Rencana Strategi BTNGR Tahun 2020-2024

---



**RINJANI**  
The beauty of nature and culture



**Ketika memaknai Rinjani  
dengan sesuatu yang hidup  
akan ada kesadaran  
bahwa dia akan lahir,  
bahwa dia akan tumbuh  
atau sakit.  
Saat sakit kita akan rawat,  
kalau tidak hati hati  
maka ia akan mati.**

*Dr. Zulkieflimansyah - Gubernur NTB  
Desa Tete Batu*

Sangkareang Menjulang Tinggi  
Foto : Iyan

# BAB. I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj), yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



salah satu pemandangan menakjubkan yang disuguhkan oleh alam pada jalur pendakian toeran

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan taman nasional, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE-SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan

target yang diurai per tahun serta rencana indikasi pendanaannya. Berdasarkan arahan dari Renstra Ditjen KSDAE tersebut, Balai TNGR telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Balai TNGR Tahun 2020-2024, yang dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) Balai TNGR Tahun 2021.

Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan dan kinerja kegiatan pengelolaan TNGR di tahun 2021, Balai TNGR menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Balai TNGR Tahun 2021 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Balai TNGR pada tahun 2021. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Ditjen KSDAE atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai TNGR sebagai instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## B. Profil Organisasi BTNGR

### Sejarah Kawasan TNGR



---

## **✚ Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Balai TNGR merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

### **Tugas pokok Balai Taman Nasional sebagai berikut :**

***"Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"***

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi yang diemban Balai Taman Nasional Gunung Rinjani adalah :

1. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. perlindungan dan pengamanan kawasan;
3. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. pengendalian kebakaran hutan;
5. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
6. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
7. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
8. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
9. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
12. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
13. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.



## ✚ Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Tahun 2021 berdasarkan P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016

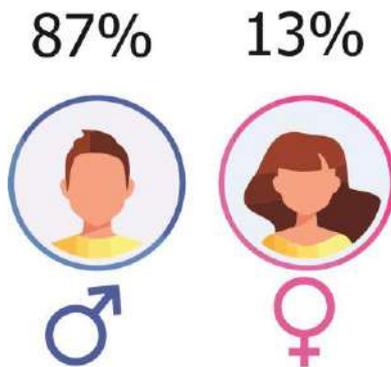


Tugas masing-masing unsur organisasi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas yaitu : melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, rencana program dan anggaran, kerjasama serta kemitraan, urusan administrasi tata persuratan, pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan promosi dan pemasaran, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas yaitu : melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan kawasan, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu :  
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

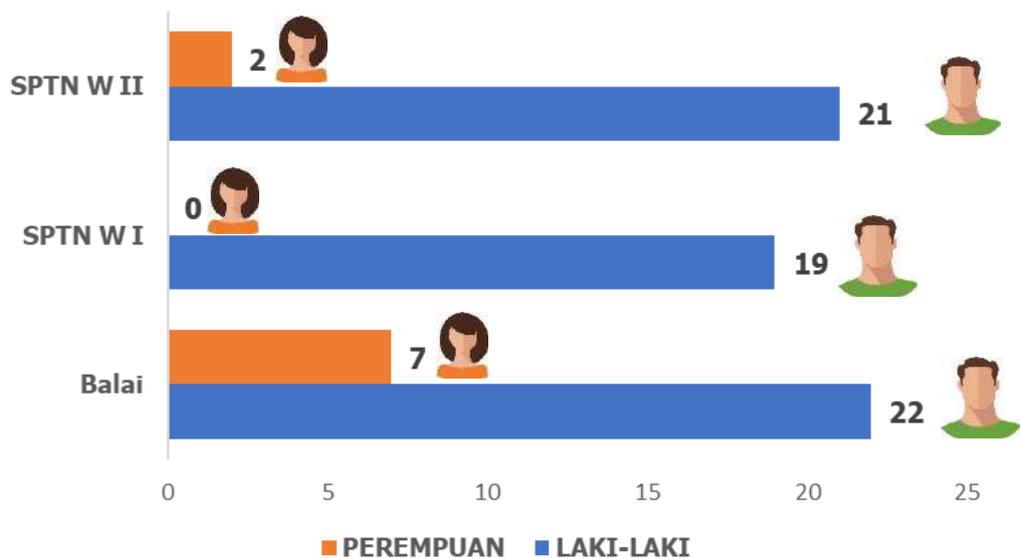
### ✚ Sumber Daya Manusia



Sumberdayamanusia merupakan salah satu aset utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memetakan keadaan dan potensi SDM dalam lingkup Balai TNGR merupakan jalan awal untuk merencanakan keberhasilan.

Dari total 71 orang Aparatur Sipil Negara di Balai TNGR, pegawai dengan jenis kelamin laki-laki masih mendominasi sebesar 87% atau 62 orang, dan pegawai berjenis kelamin perempuan memiliki proporsi sebesar 13% atau 9 orang. Selain ASN ada 43 orang pegawai yang berstatus Honorer.

Persebaran jenis kelamin pegawai berdasarkan Penempatannya adalah sebagai berikut :





Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Berdasarkan strata pendidikan, Balai TNGR diperkuat oleh pegawai S1 dengan jumlah terbanyak yakni 30 orang (42,25%), kemudian pendidikan SLTA/D1/D3 sebanyak 29 orang (40,85%), ASN dengan pendidikan setingkat S2 sebanyak 7 orang (9,86%) dan S3 sebanyak 1 orang (1,41%).



Pegawai dengan jabatan Fungsional Khusus (Definitif) merupakan jabatan terbanyak yakni 41 orang (57,75%) kemudian jabatan Fungsional umum sebanyak 18 orang (25,35%) sedangkan Pejabat Eselon III sebanyak 1 orang (1,41%) merupakan jumlah jabatan terkecil.

### berdasarkan umur



Saat ini Balai TNGR didukung oleh pegawai dengan usia produktif antara 20-49 sejumlah 59 orang (83,10%). Sedangkan sebanyak 12 orang (16,90%) pegawai berada di kelompok usia senior, yakni berusia diatas 50 tahun.

---

### C. Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan. Adapun rumusan isu strategis yang akan dibenahi pada 5 tahun mendatang :

1. Manajemen Pendakian bertaraf Internasional “Rinjaninte”

Manajemen pendakian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan pendakian di kawasan TN. Gunung Rinjani. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan terdapat beberapa indikator yang menjadi penentu keberhasilan pengelolaan TN. Gunung Rinjani. Indikator yang menentukan keberhasilan dalam manajemen Pendakian bertaraf internasional adalah Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Teknologi/rinjani 4.0.

Sarana prasarana yang memadai dan mendukung baik bagi Petugas maupun pendaki menjadikan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga mempertimbangkan penggunaannya dan biaya yang dibutuhkan untuk melengkapi sarpras tersebut. Sumber Daya Manusia yang kualitas dan kuantitasnya masih kurang, perlu ditingkatkan agar pengelolaan secara maksimal. Penggunaan teknologi /rinjani 4.0 sudah mulai diterapkan di TN. Gunung Rinjani. Meskipun masih banyak kekurangan, namun mulai diperbaiki kelemahan yang ada di dalam penerapan Teknologi 4.0 tersebut.

2. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan

Dalam bidang industri, yang sebelumnya masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi barang. Namun saat ini barang dibuat secara masal dengan menggunakan mesin dan berteknologi canggih. Keadaan seperti ini dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IT) yang tersedia saat ini, Balai TNGR telah dapat melakukan pemantauan pengunjung secara langsung (*realtime*) di beberapa titik jalur pendakian diantaranya Pelawangan Senaru, Pelawangan Sembalun, Gunung Kondo dan Danau Segara Anak.

---

Hal ini dapat dilakukan karena Balai TNGR telah memasang *Remote Monitoring Station* di beberapa titik jalur pendakian sehingga dapat memudahkan untuk memantau aktifitas pengunjung di titik – titik tersebut. Segala kegiatan di Rinjani sekarang sudah menggunakan system Online, Baik Aktifitas setiap hari yang diterapkan dengan aplikasi RinjaniNTE dan pemesanan tiket Online pendakian yang harus dilaksanakan secara Online dengan *eRinjani*, dan penerapan Route Traking bagi pendaki.

### 3. Pengembangan Sistem database Kawasan

Data dan informasi ekosistem dan kehati di TN. Gunung Rinjani masih terbatas. Jenis dan sebaran data dalam konteks spasial dan temporal masih belum optimal. Sumber data yang tersebar di berbagai pihak menuntut adanya sistem basis data yang perlu ditingkatkan. Data yang dihasilkan haruslah memiliki nilai akuntabel dan memiliki format baku dalam pelaporannya. Data yang valid menjadi harapan pengelola dan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan pengelolaan TN. Gunung Rinjani yang efektif.

### 4. Pemberdayaan Daerah Penyangga

Sesuai dengan amanah Permenhut Nomor : P.04/MenhutII/2005 bahwa kesejahteraan masyarakat disekitar hutan perlu ditingkatkan demi pemerataan pembangunan dan keberlangsungan pengelolaan kawasan. Faktor kemiskinan masyarakat sekitar hutan menjadi pendorong bagi tindakan ilegal seperti perambahan kawasan, penebangan dan perdagangan kayu. Saat ini TN. Gunung Rinjani telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan penyangga hutan.

### 5. Harmonisasi stakeholder

Keberhasilan program dalam pengelolaan suatu organisasi dibutuhkan Kerjasama di semua stakeholder. Stakholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. Sinkronisasi program & kegiatan, Kerjasama Penyelenggaraan kawasan konservasi, Community-Development perlu diselaraskan antara pihak yang memiliki progam dalam pengelolaan kebijakan dengan Intansi Lain baik dengan Instansi Pemerintah yang lain ataupun LSM.

-----

Dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Balai TNGR tidak lepas dari permasalahan. Permasalah-permasalahan yang dijumpai diantaranya :

1) Pengelolaan pengunjung pendakian

Pendakian merupakan ikon utama bagi TNGR. Jika dianggap "produk", Ketika orang menyebut TNGR maka yang terbayang pertama adalah pendakian. TNGR telah membangun *image* sebagai pendakian bertaraf internasional yang dikelola berdasarkan prinsip ekowisata pada rentang 2015-2019. Kemudian image tersebut direncanakan lebih khusus dengan pelaksanaan kegiatan berupa pengembangan *booking online system*, penetapan kuota pengunjung, penanganan sampah secara terpadu, pengelolaan toilet, sistem monitoring pengunjung *real-time*, penyusunan SOP pendakian, penertiban IUPJWA dan sertifikasi pemandu gunung.

Sistem dan aturan yang disusun dan dibangun dalam SOP Pendakian telah cukup baik mengatur pendaki dengan adanya sanksi berupa *blacklist*. Hanya saja dalam penerapan masih belum optimal terkait pelaporan saat *cek out* antara kepatuhan pendaki maupun petugas dipintu pendakian.

System monitoring pengunjung *real-time* mulai dibangun. System bernama *Remote Monitoring Station* (RMS) ini berfungsi sebagai pemantau visual pada lokasi-lokasi penting dan rawan terjadinya kecelakaan atau pelanggaran dalam kawasan pada umumnya dan pada jalur pendakian khususnya. Pada saat ini telah terbangun 6 tower yaitu tower Kondo sebagai pusat relay, tower Danau, tower Plawangan Senaru, tower Plawangan Sembalun, tower Sangkareang dan tower Santong. Pada akhir 2020 hanya 4 CCTV yang fungsional selain tower Sangkareang dan Santong yang masih perlu maintenance. Aspek teknologi *live-streaming* dari keberadaan RMS mampu memberikan informasi kondisi terkini di kawasan TNGR terutama di Plawangan Senaru, Sembalun, Kondo dan Danau Segara Anak seperti aktivitas dan perilaku pendaki. Pemantauan RMS telah dapat diakses melalui pc dan gadget portable/ stasioner dan *mobile*, sehingga pengelola bisa memantau dimana saja dan kapan saja. Permasalahan dalam RMS adalah tidak adanya SDM internal yang kompeten dalam bidang jaringan sementara RMS bersifat fasilitas *outdoor* yang rentan gangguan. Kemudian RMS juga masih dibangun terbatas sehingga terbatas juga pemantauan aktivitas pendaki.

Dalam mendukung *eRinjani* dibangun juga tower internet di 4 pintu pendakian dan memanfaatkan tower RMS sebagai jalur jaringan internet yang direlay dari Mataram. Adanya jaringan data ini dipergunakan untuk mendukung aktivitas baik petugas maupun pendaki dalam proses *ticketing*. Pada penggunaan lebih lanjut jaringan data ini juga dapat dimanfaatkan oleh pendaki di tower-tower RMS yang

---

ada meskipun masih dengan *bandwith* terbatas. Permasalahan ada pada faktor tidak konsistennya koneksi data karena medan dan cuaca. Pada pengembangan lebih lanjut dapat diupgrade peralatan dan bandwith jaringan.

Untuk menjamin keselamatan pendaki telah ada aplikasi pemantauan pendaki, asuransi, SOP evakuasi, sign board sepanjang jalur dan perbaikan jalur pendakian. Pada kasus kecelakaan dan hilangnya pendaki yang masih terjadi pada 2020 perbaikan jalur perlu menjadi focus utama. Masih banyak titik-titik yang masih rancu dengan jalur lama pasca gempa 2018. Perlu lebih detail diperbanyak rambu-rambu arah di sepanjang jalur serta perbaikan trap/tangga, alat bantu/railing.

*Over capacity* pendaki dijawab dengan adanya Studi Daya Dukung pada tahun 2018 sebagai input ke penerapan kuota pendakian melalui aplikasi *eRinjani*, kerjasama dengan P3E Bali Nusra. Hanya saja daya dukung yang direkomendasikan tersebut masih berbasis kondisi sebelum gempa 2018

## 2) Pengelolaan sampah

Sampah menjadi residu terkait meningkatnya jumlah kunjungan ke TNGR. Perhitungan pada kondisi normal (sebelum gempa tahun 2018 dan pandemic Covid19 tahun 2019-2020), jumlah kunjungan selama rata-rata per tahunnya adalah 45.313 pendaki. Apabila diasumsikan sampah yang dihasilkan perorang pendaki adalah 2 Kg maka potensi sampah yang dihasilkan oleh pengunjung secara keseluruhan adalah 90.626 Kg per tahun. Sedangkan dari volume tinja yang dihasilkan, apabila diasumsikan jumlah tinja perorang perhari adalah 83 gram dan rata-rata lama hari kunjungan adalah tiga hari maka jumlah tinja yang dihasilkan oleh pengunjung pertahun adalah 11.282,9 Kg.

Saat ini sudah ada kebijakan pengelolaan sampah berupa pack in dan pack out di pintu masuk maupun pintu keluar pendakian, serta adanya sanksi black list bagi pengunjung yang tidak membawa sampahnya turun. Pada kenyataannya kebijakan belum mampu mengurangi sampah. Permasalahan pada level kesadaran sebagian pendaki yang masih rendah, terbatasnya coverage pandang cctv dalam pemantauan pelanggaran kemudian perilaku monyet ekor panjang yang suka mengambil atau mencuri makanan para pendaki sehingga muncul sampah yang berserakan. Selain itu, belum adanya sanksi yang tegas untuk diberikan kepada tindak pelanggaran yang membuang sampah sembarangan membuat para pendaki mengacuhkan dan masih membuang sembarangan.

---

### 3) Kualitas dan kuantitas SDM

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dirasakan kurang oleh seluruh Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada TNGR Sendiri, Luasan yang dibebankan dengan SDM yang masih terbatas jumlahnya, sangatlah kurang dalam pengelolaannya. Organisasi di tingkat Resort masih sangatlah kurang, Luas Resort, jumlah SDM dan sarana prasarana masih belum proporsional sehingga belum bisa terwujudnya pengelolaan Taman Nasional berbasis Resort secara baik. Pengembangan kemampuan bagi SDM yang dimiliki harus ditingkatkan. Kualitas dan kuantitas SDM yang dirasakan kurang, sehingga perlu adanya strategi Khusus agar dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani bisa maksimal.

### 4) Pengelolaan data dan informasi kawasan

Data dan informasi sangat dibutuhkan dalam hal mengelola kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini, masih banyak yang beranggapan data kurang penting dalam organisasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai data sehingga mengakibatkan banyak yang menganggap data tidak terlalu penting. Di sisi lain, format data yang belum terstandar, kapasitas teknis yang belum merata sehingga mengakibatkan data yang diperoleh tidak maksimal dan informasi yang didapatkan tidak dapat dijadikan pengelolaan kedepannya. Untuk menghasilkan data yang akuntabel, maka diperlukan format data yang baku dan dirumuskan secara baik serta edukasi yang maksimal sehingga data dapat dikelola secara optimal dan informasi yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman agar pengelolaan bisa dilaksanakan secara optimal.

**Bergai program kolaborasi telah berhasil disinergikan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Penyelesaian konflik sosial di Pesugulan, Penanganan Kebakaran Hutan di Sembalun, Pembinaan UMKM di desa Penyangga Kampanye pelestarian celepuk rinjani, merupakan contoh kontribusi nyata Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bagi pembangunan Nusa Tenggara Barat.**

*Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah - Wakil Gubernur NTB  
Desa Sembalun 2021*

*Puncak Rinjani 3.762 m.dpl.  
Foto : eWWe*

# BAB. II

## Perencanaan Kinerja

### A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, menegaskan kembali bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Trisakti. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun, penggerak, pemersatu, dan sekaligus sebagai bintang pengarah.

#### VISI

*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*

#### MISI



Peringkatan Kualitas Manusia Indonesia



Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan



Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



Petegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya



Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya



Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi dan Misi Presiden tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan yang dijabarkan dalam 4 (empat) Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi yaitu *"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"* dalam mendukung *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"*.

Adapun Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian LHK adalah :



Sasaran kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2020 - 2024 yaitu :



Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran tahun 2020 terdapat perubahan program pada KLHK. Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mengalami perubahan yang semula 1 program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjadi 3 program yaitu :



## B. Target Jangka Menengah BTNGR (2020-2024)

Target jangka menengah Balai TNGR dalam menunjang pencapaian target Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2020-2024 berdasarkan Redesain sistem program dan penganggaran adalah sebagai berikut :



Tabel 1 : Matrik Target Jangka Menengah Balai BTNGR 2020-2024

No	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Target	Target Kumulatif				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Dukungan Manajemen</b>					-	-	-
<b>5419</b>	<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem</b>						
	Sasaran Kegiatan : <i>Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE</i>						
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	Poin	78	78,5	79	79,5	80
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	4
	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Opini WTP	1	1	1	1	1
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>					-	-	-
<b>5420</b>	<b>Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>						
	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi						
	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	Hektar	7.769	19.064	24.064	29.064	33.562
	Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas						
	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	1	1	1	1	1
<b>5421</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>						
	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi						
	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	5	15	25	35	35
	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Hektar	90	190	240	290	340
	Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati						
	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Hektar	300	370	435	500	546

No	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Target	Target Kumulatif				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sasaran Kegiatan 3: Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi						
	Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	1	1	1	1	1
<b>5422</b>	<b>Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik</b>						
	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan kehati di dalam dan di luar kawasan konservasi						
	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam dan diluar kawasan konservasi	Hektar	12.256	31.320	34.320	37.320	40.320
<b>5423</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Kawasan Konservasi</b>						
	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan						
	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Destinasi	1	1	1	1	1
	Jumlah unit pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam	Entitas	1	2	3		

### C. Target Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diatas selanjutnya dibuatkan pernyataan kerjanya melalui Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian Kinerja, maka terwujudlah komitmen pemberian amanah dari atasan kepada bawahan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Balai TNGR Tahun 2021 sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja BTNGR Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
1.	Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (kumulatif)	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	19.064,75 hektar
2.	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan open area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	100 hektar
		Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	5 desa
		Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektifitas Pengelolaannya	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 unit KK
		Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	13 hektar
3.	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	luas kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	19.064,75 hektar
4.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam.	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	1 entitas
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka ekowisata.	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	2 kelompok masyarakat
		Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	1 unit
4.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	Layanan Perkantoran	1 Layanan
			Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
			Layanan Sarana internal	1 Unit



RINJANI ADALAH PUSAT KOSMOS YANG MERUPAKAN ORIENTASI KOSMOLOGIS MASYARAKAT SASAK PADA UMUMNYA DENGAN MENYEBUTNYA SEBAGAI "DAYE". PUSAT KOSMOS MERUPAKAN PUSAT KEKUATAN MAGNET BUMI DAN KEKUATAN SPRITUALITAS SEHINGGA SELURUH ARAH (DALAM KONTEKS PERADABAN) DIORIENTASIKAN KE ARAHNYA. MISALNYA DALAM ORIENTASI PENATAAN RUANG. RINJANI SEBAGAI SIMBOL EKOLOGIS DISEBUT SEBAGAI "PASEK GUMI" YANG MENJAMIN KEHARMONISAN KEHIDUPAN DALAM KELESTARIAN DAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN. (MONOGRAFI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2011.)

SEBAGAI PUSAT KOMOS, RINJANI MENJADI INSPIRASI TERBENTUKNYA RITUAL-RITUAL ADAT SUKU SASAK. SEBUT SAJA PROSESI ADAT "SEMBOQ" DI KECAMATAN BAYAN, UPACARA ADAT "NGAYU-AYU" DI KECAMATAN SEMBALUN, RITUAL ADAT "ASUH GUNUNG" DI MAYSARAKAT ADAT SENARU DAN SAJANG, PROSESI "BETETULAK" DI DESA PENGADANGAN. SELAIN RITUL ADAT DI ATAS RINJANI JUGA DICERITAKAN DALAM BEBERAPA MANUSKRIP MISALNYA MANUSKRIP "DOYAN NEDE", BABAD LOMBOK, BABAD SAKRA DAN CERITA RAMAYANA.



[btn\\_gn\\_rinjani](#)



[Tng Rinjani Tngr](#)



[@btn\\_gn\\_rinjani](#)



[rinjaninationalpark.id](#)



[+62811283939](#)



---

## BAB. III

# Akuntabilitas Kinerja

---

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas Balai TNGR yang memuat hasil pengukuran Capaian Kinerja Balai TNGR untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Balai TNGR yang telah diperjanjikan dan ditandatangani oleh Kepala Balai dengan Direktur Jenderal KSDAE dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai TNGR Tahun 2021.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKK pada masing-masing perspektif dengan hasil persentase pencapaian kinerja atau membandingkan hasil kinerja dengan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.2/KSDAE-SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam. Adapun formulasi pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$C = \frac{R}{T} 100 \%$$

Dimana : C = tingkat capaian target kinerja  
R = realisasi capaian target kinerja  
T = target kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$C = \frac{T - (R - T)}{T} 100 \%$$

Dimana : C = tingkat capaian target kinerja  
R = realisasi capaian target kinerja  
T = target kinerja

Untuk meminimalisir adanya bias dalam perhitungan pencapaian kinerja, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, disebutkan bahwa IKK yang pencapaiannya melebihi 150,00 % diasumsikan pencapaian kinerjanya maksimal 150,00 %.

Untuk menetapkan berhasil tidaknya suatu kegiatan, maka digunakan kriteria skala pengukuran ordinal yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara yaitu :

- Nilai tingkat capaian < 55,00% termasuk kategori kurang baik atau tidak berhasil;
- Nilai tingkat capaian 56,00% - 70,00% termasuk kategori sedang atau cukup berhasil;
- Nilai tingkat capaian 71,00% - 85,00% termasuk kategori baik atau berhasil;
- Nilai tingkat capaian > 86,00% termasuk kategori sangat baik atau sangat berhasil.

Untuk capaian kinerja Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pada tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja disajikan pada tabel 4 (empat) sebagai berikut :

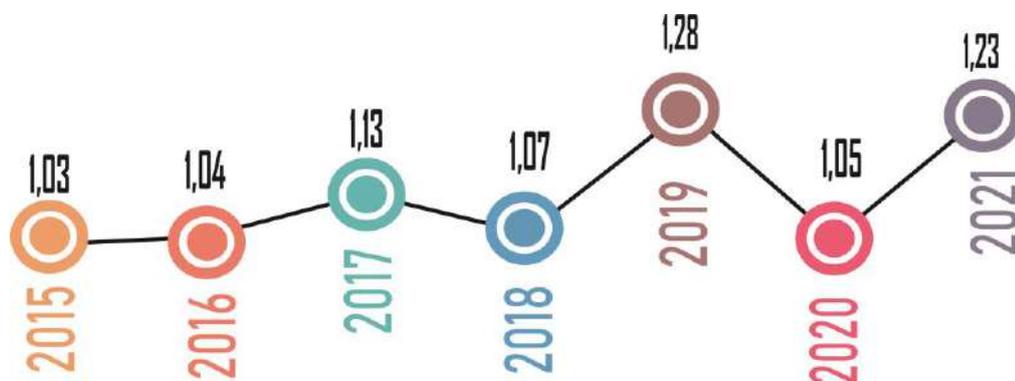
Tabel 3 : Pengukuran Capaian Kinerja BTNGR Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (kumulatif)	19.064,75 hektar	19.064,75 hektar	100,00
2.	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan open area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat	100 hektar	189,47 hektar	150,00
		Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	5 desa	7 desa	140,00
		Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektifitas Pengelolaannya	1 unit KK	1 unit KK	100,00
		Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangan	13 hektar	12,4 hektar	95,38
3.	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	luas kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	19.064,75 hektar	19.064,75 hektar	100,00
4.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam.	1 entitas	2 entitas	150,00
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka ekowisata.	2 kelompok masyarakat	3 kelompok masyarakat	150,00
		Jumlah destinasi wisata alam prioritas	1 unit	1 unit	100,00
5.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	78,5 point	80,02 point	101,94
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 level	3,91 level	130,33
<b>Capaian Kinerja Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Tahun 2021</b>					<b>119,79</b>

Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Balai TNGR adalah sebesar 119,79 % atau masuk "kategori sangat baik atau berhasil". Nilai Kinerja Balai TNGR tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 17,16% dibandingkan tahun 2020. Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Balai TNGR dari tahun 2015-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sedangkan untuk menilai tingkat efisiensi capaian kinerja dihitung dengan membandikan antara nilai capaian kinerja, dengan persentase realisasi anggaran dengan capaian rasio di tahun 2021 sebesar 1,23 atau dinyatakan " Efektif ". Adapun perkembangan nilai rasio tingkat efisiensi capaian kinerja Balai TNGR dari tahun 2015-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



## Analisis Capaian Kinerja

Berikut akan diuraikan analisis masing-masing capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan Balai TNGR di Tahun 2021.

### Sasaran kegiatan terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi.



#### 1.1. Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi adalah untuk memperoleh data informasi keanekaragaman hayati tinggi yang terverifikasi



(tinggi, sedang dan rendah) dan dilengkapi dengan fitur Kawasan berupa ekosistem dan spesies kuncinya. Berdasarkan target tahun 2021, dilakukan inventarisasi dan verifikasi seluas 19.074,74 hektar dengan hasil seluas 19.074,74 hektar atau terealisasi 100 %.

Tabel 4 : Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Keanekaragaman Tinggi

Kegiatan	Rencana	Realisasi	Lokasi
Inventarisasi Keruing	2,00	2,00	Salut dan Santong
Inventarisasi Sosial Ekonomi dan Budaya zona religi	39,76	39,76	Santong
Inventarisasi Anggrek Endemik	1.805,99	1.805,99	Torean,Sajang,Propok, Jalur Aik Berik,
Identifikasi dan inventarisasi Kupu-kupu	1.000,00	1.000,00	Senaru,Torean Joben
Inventarisasi Musang Rinjani	1.000,00	1.000,00	Aik Berik, Torean, Kembang Kuning, Aikmel
Inventarisasi Itik Gunung ( <i>Anas superciliosa</i> )	1.500,00	1.500,00	Danau Segara Anak
Inventarisasi Tumbuhan Obat (updating data)	13.717,00	13.717,00	Senaru,Santong,Setiling, Joben, Kembang Kuning, Aikmel, Sembalun,
<b>JUMLAH</b>	<b>19.064,75</b>	<b>19.064,75</b>	

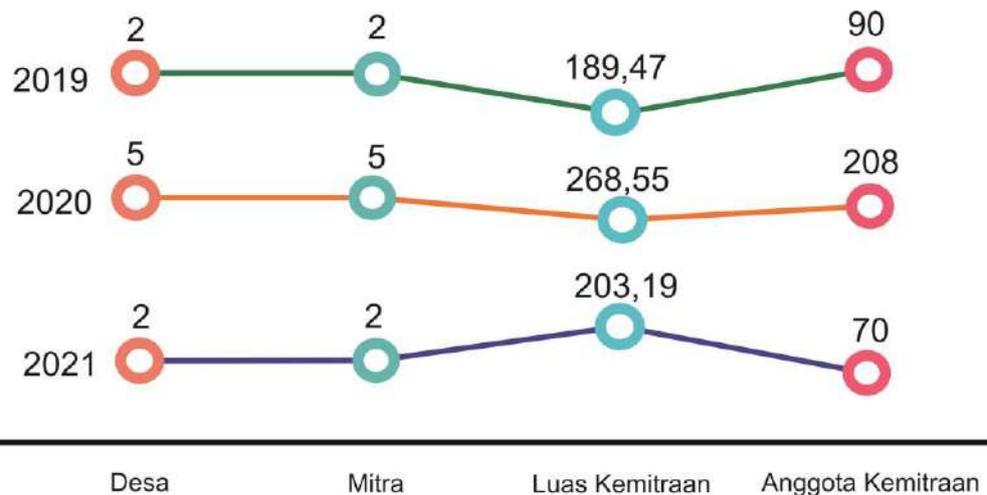
**Sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.**

### 2.1. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat

Dalam PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mengamanatkan bahwa



pemerintah harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk mendukung kelestarian kawasan. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona tradisional kepada masyarakat setempat dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.



Tahun 2021 Balai TNGR telah memberikan akses kepada masyarakat berdasarkan Surat Persetujuan Dirjen KSDAE No. S.925/KSDAE/KK/KSA.1/11/2021 tanggal 19 November 2021 di 2 desa yakni desa Sajang dan desa Santong seluas 189,47 hektar.

Hingga tahun 2021 pemberian akses kemitraan konservasi pemanfaatan tradisional pada zona tradisional dituangkan pada dokumen PKS antara Kepala Balai dengan ketua kelompok masyarakat pada area seluas 661,21 Ha yang tersebar pada 9 desa. Adapun total anggota atau kepala keluarga yang terlibat dalam kemitraan konservasi adalah sebanyak 2.193 orang. Pelibatan masyarakat yang memanfaatkan potensi kawasan dan tinggal disekitar kawasan konservasi, menjadi penting dalam pengelolaan kawasan konservasi



Sosialisasi aturan TNGR terkait pemanfaatan HHBK di wilayah Lingkung Tebatu Resort Joben

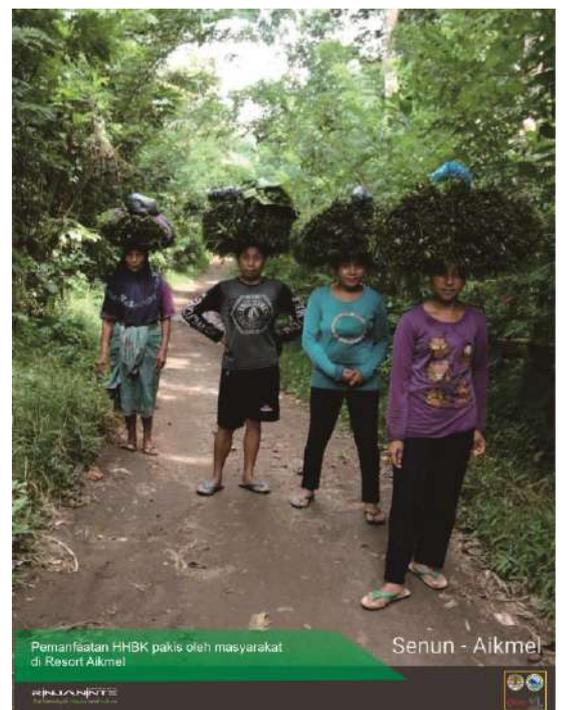


Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi dengan Kelompok Tani Hutan Lingkup Balai Taman Nasional Gunung Rinjani



Pemanfaatan HHBK rumput oleh masyarakat di Resort Joben

Karti V.J



Pemanfaatan HHBK pakis oleh masyarakat di Resort Aikmei

Senun - Aikmei

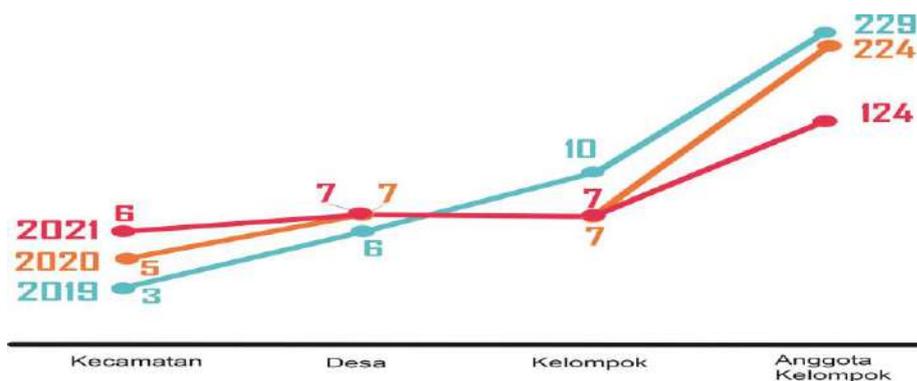
## 2.2. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat .

Tercapainya indikator kinerja Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat ditandai dengan



adanya kesepakatan konservasi antara kepala desa dengan kepala balai. Selama kurun waktu 3 tahun TNGR sudah memebrikan bantuan di 9 kecamatan, 16 desa kepada 24 kelompok.

Penyebaran bantuan kepada kelompok pertahunnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Tahun 2021 terdapat penandatanganan kesepakatan konservasi antara kepala balai dengan 7 kepala desa. Di dalam kesepakatan tersebut kepala desa sebagai representasi dari pemerintah desa yang berada di sekitar kawasan konservasi (KK) mengakui keberadaan kawasan konservasi sebagai hutan negara dan memberikan dukungan dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka menjaga kelestarian kawasan. Selain itu, di dalam kesepakatan-kesepakatan konservasi juga memuat komitmen pengelola KK untuk melaksanakan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan dan pendampingan kelompok, pengembangan usaha ekonomi dan bantuan usaha, pengembangan akses pasar (pemasaran produk), peningkatan kapasitas kelompok, pemberian akses melalui kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem, pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Masyarakat Peduli Api (MPA), dll.

Tabel 5 : Pendampingan Kelompok Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan tahun 2021

Nama Kelompok	Alamat	Anggota	Jenis Bantuan	Pendamping
Kelompok Pemuda Sebau Lestari (KPSL)	Dusun Pesugulan, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur	34	Pembuatan Plying Fox	Gregorius Fobia
Kelompok Tani Dayan Rurung	Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Lombok Timur	23	Produksi Olahan Ashitaba	Ilyas Rawi,S.Hut.
Kelompok Tani Hutan Sopoq Angen	Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading Lombok Timur	44	Usaha Inovasi Pakan Ternak dan Budidaya Lebah Madu,serta Budidaya Kroto	Supriyanto
Kelompok Masyarakat Peduli Hutan Sadar Lestari	Jln.Wisata Otak Kokok, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading Lombok Timur	11	Usaha Penyediaan Jasa Wisata (Penataan Areal Camping dan Outbound)	Maria Imaculata Wonga,A.Md.
Kelompok Tani Turunan Jaran	Dusun Semporonan Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela Lombok Timur	25	Pembibitan	Muhammad Faisyal MY,SP.
Kelompok Tani Hutan Hijau	Dusun Nyeredep Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Lombok Tengah	33	Pembuatan Gula Semut	Ansori,S.Hut.
Kelompok Pengrajin Tenun Fetung Bayan	Dusun Karang Salah Desa bayan Kecamatan Bayan Lombok Utara	16	Kerajinan Tenun	Tri Dasta Nursehaneka Y., S.Hut.





Pelatihan dasar bagi porter pemula



Pelatihan inovasi Pakan Ternak



Pelatihan pembuatan survenir berupa gantungan kunci bahan resin

RINJANITE  
The beauty of nature and culture



Selain pendampingan kepada kelompok binaan, TN Gunung Rinjani juga melakukan pendampingan kepada desa Timbanuh dalam rangka melakukan kegiatan indentifikasi/karakterisasi alpukat varietas lokal unggul dan pendaftaran farietas unggulan desa yakni tanaman apokat hingga mendapatkan sertifikat dari pemerintah.

### LAMPIRAN TANDA DAFTAR VARIETAS LOKAL

Nomor : 1701/PVL/2021  
 Pendeskripsi : Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si., Eka Widiastuti, SP., Fitrahtunnisa, M.Si., Nani Herawati, SP.,M.Si., Baiq Arie Sudarmayanti, SP. (BPTP NTB), Muhammad Faisyal MY (Balai TN Gunung Rinjani Kementerian LHK), H. M. Abadi, SP.(Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur)

### DESKRIPSI ALPUKAT VARIETAS ALPOKAT MARTA HIJAU TIMBANUH

Foto yang disebut dalam deskripsi :



REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN PERTANIAN  
 PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

### Tanda Daftar Varietas Tanaman

**VARIETAS LOKAL**  
**NOMOR : 1701/PVL/2021**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang Syarat Penanaman dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Hasil Pemuliaan Kepada :

Nama Pemohon : **BUPATI LOMBOK TIMUR**  
 Alamat : JI. Prof. M. Yamin No. 57 Selong Lombok Timur NTB  
 Tanggal Penerimaan Pendaftaran : 02 September 2021  
 Jenis Tanaman : **Alpukat**  
 Nama Varietas : **Alpokat Marta Hijau Timbanuh**

Dengan Demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT, serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Jakarta, 10 September 2021  
 Kepala Pusat,



Prof.(Riset), Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si.  
 NIP 196303011989031002

### 2.3 Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektifitas Pengelolaannya

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan

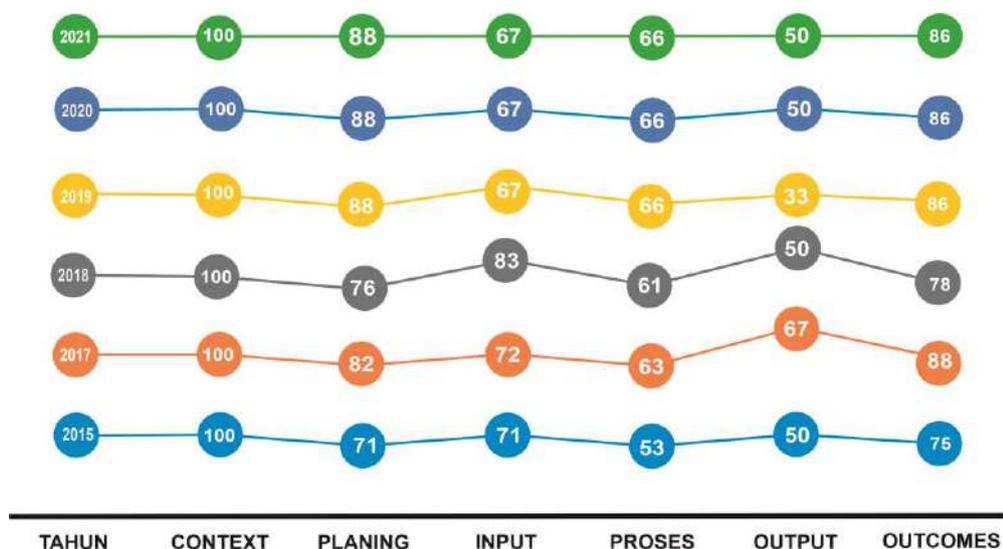
yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) ada salah satu alat yang digunakan untuk melakukan penilaian efektivitas pengelolaan suatu kawasan. Adapun nilai Indeks METT yang hendak dicapai adalah minimal 70%.

Capaian kinerja penilaian efektivitas pengelolaan TN Gunung Rinjani adalah sebanyak 1 Unit Kawasan Konservasi (KK) dari target yang direncanakan sebanyak 1 Unit KK atau terealisasi 100 %. Adapun penilaian self assesment METT di tahun 2021 adalah 71,00 % atau sama dengan hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2020. Nilai METT dari tahun 2015 hingga tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini.

Rencana	1 Unit KK
Capaian	1 Unit KK
Kinerja 2021	100,00 %
Capaian hingga tahun 2021 terhadap Renstra 2020-2024	100,00 %



Penilaian METT dilakukan terhadap 6 elemen yakni ; Context, Planing, Input, Process, Output dan Outcome. Adapun 6 elemen penilaian dan hasil yang dievaluasi yakni ; Context sebesar 100%, Planing 76%, Input 83%, Process 61%, Output 50% dan Outcome 78%.



#### 2.4. Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangan

Pemulihan ekosistem merupakan upaya atau tindakan pemulihan agar ekosistemnya kembali ke kondisi asli atau sesuai dengan tujuan pengelolaan.

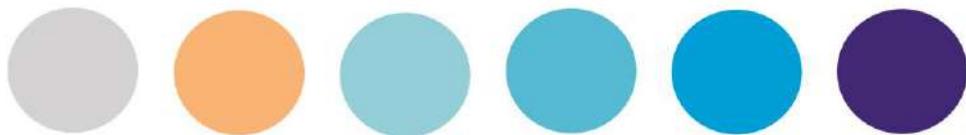
Pemulihan ekosistem ditahun 2021 direncanakan di Resort

Aikmel seluas 13 hektar, namun karena adanya refocusing anggaran, kegiatan ini hapus. Dalam rangka pemenuhan capaian output yang telah direncanakan TN Gunung Rinjani bekerja sama dengan stakeholder melakukan pemulihan ekosistem seluas 12,40 hektar pada beberapa lokasi yakni ;

- a. Wilayah Resort Joben seluas 6,00 hektar bekerjasama dengan Pecinta Alam dari Pringgasela, Universitas Hamzanwadi, Universitas Mataram, LP3I Mataram, anggota Kelompok Masyarakat Peduli Hutan desa Pesanggrahan wilayah Resort Aikmel dan anggota MMP Resort Joben.



- b. Wilayah Resort Aikmel seluas 3 hektar dan wilayah Resort Sembalun 3,4 hektar penanaman turus jalan bekerja sama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram.



**Sasaran kegiatan terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi.**

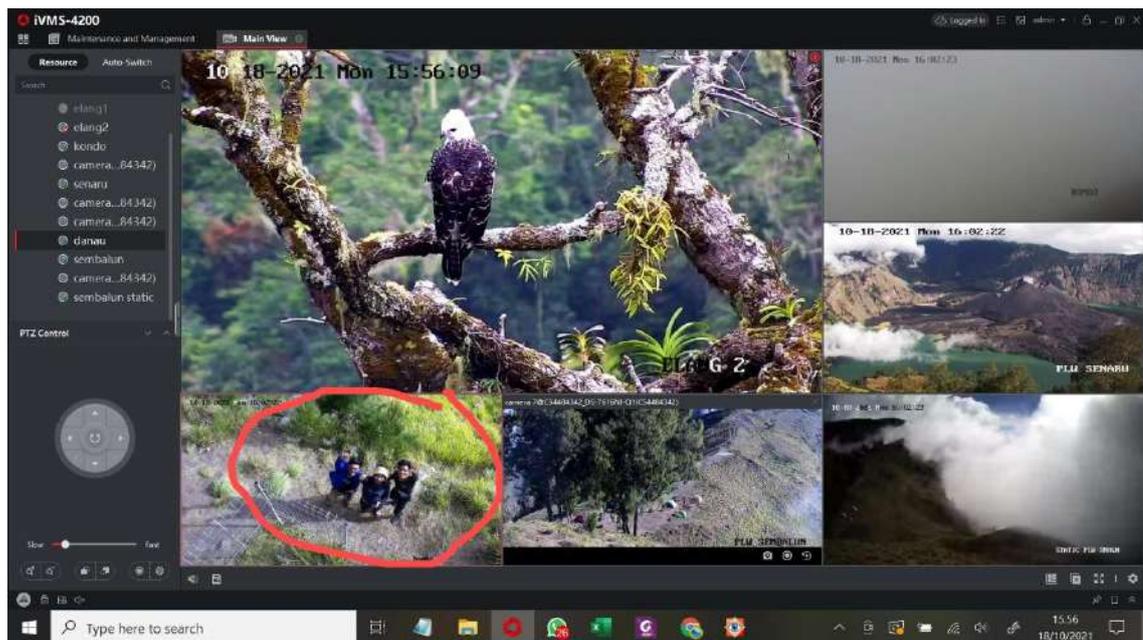
### **3.1. luas kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL Target 19.064,75 Ha Terealisasi 19.064,75 Ha (100,00 %)**

Target Renstra 2020-2024 terkait output kegiatan konservasi spesies dan genetik adalah luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif seluas 40.320 hektar.

Sebagai upaya untuk mengidentifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi, pada tahun 2021 luasan kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati adalah 19,074,74 hektar, sehingga capaian hingga tahun 2021 seluas 31.320 hektar.

Selain melakukan kegiatan inventarisasi, TN Gunung Rinjani juga melakukan pengamatan satwa di alam terbuka dengan menggunakan teknologi cctv dan kamera trap. Pada tahun 2021 berhasil melakukan pengamatan secara langsung di alam kelahiran dan pertumbuhan Elang Flores (*Nisaetus floris*) yang diberi nama "BADRA" selama 24 non stop dengan menggunakan teknologi CCTV



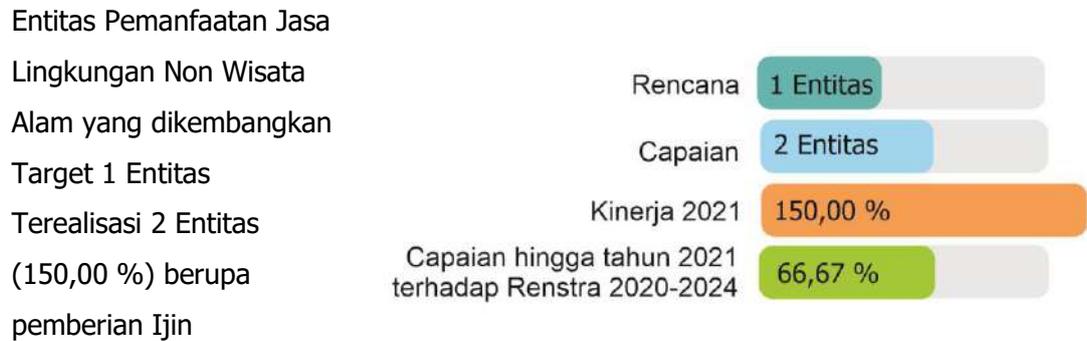




**Sasaran kegiatan terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan.**



**4.1. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam.**



Pemanfaatan Air oleh Masyarakat non komersil untuk 5 desa yakni :

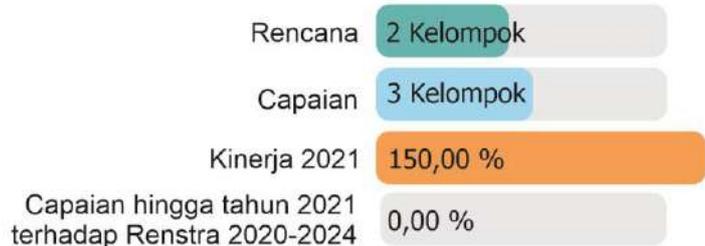
- a. Masyarakat Desa Timbanuh, Desa Pengadangan dan Pengadangan Barat dari Sumber Mata Air Mayung Polak berdasarkan Keputusan Kepala Balai No.SK.83/T.39/TU/KSA/4/2021 tanggal 19 April 2021, debit air yang dimanfaatkan adalah 67,265 liter/detik dengan jumlah kepala keluarga pemanfaat sebanyak 706 KK.
- b. Masyarakat Desa Pringgajurang Utara dan Desa Tete Batu Selatan dari Sumber Mata Air Minggaya berdasarkan Keputusan Kepala Balai No. SK.140/T.39/TU/KSA/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, debit air yang dimanfaatkan adalah 7,8 liter/detik dengan jumlah kepala keluarga pemanfaat sebanyak 1000 KK.

Tabel 6 : Pemberian Ijin Pemanfaatan Air

Tahun	Desa	Kelompok	Jumlah KK	PKS
<b>2019</b>	1	1	1.839	1
<b>2020</b>	2	2	692	2
<b>2021</b>	5	2	1.706	2
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4.237</b>	<b>5</b>

#### 4.2. Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka ekowisata.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan konservasi, terutama masyarakat yang bergerak di bidang wisata, TN Gunung



Rinjani sejak tahun 2020 telah membina sebanyak 13 kelompok pengelola destinasi wisata yang ada di TN Gunung Rinjani dengan memberikan ijin jasa wisata alam, adapun jumlah anggota Pokdarwis sebanyak 504 orang.

Pada tahun 2021 TN Gunung Rinjani memberikan bantuan langsung kepada 3 Kelompok Sadar Wisata yakni ; Kelompok Sadar Wisata Tereng Wilis di Desa Perian,

Kelompok Masyarakat Sadar Wisata"Jaga Raganta"di desa Gumantar dan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata" Kampung Wisata Tete Batu desa Tete Batu. Kemudian mengikutsertakan sebanyak 7 kelompok sadar wisata dalam pelatihan peningkatan kapasitas pendamping dan kelompok binaan di Desa Senaru serta mengirim sebanyak 5 orang untuk mengikuti benchmarking kegiatan pengelolaan wisata di TN Meru Betiri dan Desa Pujon Kidul.



**Jambore Desa Wisata, Kreatif, Inovatif Kolaboratif Bangun Desa Wisata, di Ulem Ulem, Desa Tetebatu.**

**RINJANITE**  
The beauty of nature and culture



**Peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata di ulem ulem desa Tete Batu oleh kepala Resort Joben**

**RINJANITE**  
The beauty of nature and culture



### 4.3. Jumlah destinasi wisata alam prioritas

Pendakian merupakan ikon utama bagi TNGR. Jika dianggap “produk”, ketika orang menyebut TNGR maka yang terbayang pertama adalah pendakian. TNGR telah membangun *image* sebagai pendakian

bertaraf internasional yang dikelola berdasarkan prinsip ekowisata. Hingga tahun 2021 terdapat 6 jalur pendakian yang ada dikawasan TNGR yang telah dikembangkan. Dalam pengembangan jalur pendakian TNGR sudah mulai menerapkan teknologi 4.0 seperti : pengembangan *booking online system (eRinjani)*, System monitoring pengunjung *real-time* mulai dibangun bernama *Remote Monitoring Station (RMS)* atau CCTV, Route Traking Pengunjung, Pembangunan tower internet di 4 pintu pendakian dan memanfaatkan tower RMS sebagai jalur jaringan internet yang direlay dari Mataram,

Selain pengembangan jalur pendakian TN Gunung Rinjani juga membuka dan mengembangkan destinasi baru non pendakian dimana hingga tahun 2021 terdapat 15 destinasi yang sudah dilakukan pengembangan dan penarikan PNBP. Perkembangan destinasi yang telah dilakukan pungutan PNBP dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**1** JALUR WISATA PENDAKIHAN ANBERIK

**2** JALUR WISATA PENDAKIHAN SENARU

**3** JALUR WISATA PENDAKIHAN TOREAN

**4** JALUR WISATA PENDAKIHAN SENBALUN

**5** JALUR WISATA PENDAKIHAN TIMBAHUH

**6** JALUR WISATA PENDAKIHAN TETESATI

**7** SAVANA PROPOK

**8** AIR TERJUN TIU NGUMBAK

**9** AIR TERJUN MAMOKU SAKTI

**10** AIR TERJUN RENIMBUNGAN

**11** JALUR SEPEDA

**12** BUKIT TALAGA

**13** BUKIT GEDONG

**14** SEBAU

**15** BUKIT MALANG

**16** TANGKOK ADENG

**17** MAYUNG POLAK

**18** GUNUNG KUKUS

**19** AIR TERJUN JERUK MANG

**20** ULEM - ULEM

**21** OTAK KOKOK JOBEN

**22** FELAGA BIRU

**23** TRENG WELIS

**TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI**  
**DESTINASI WISATA**  
**TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI**

**RINJANITE**  
 The beauty of nature and culture

btn\_gn\_rinjani  
 Tng Rinjani Tngr  
 @btn\_gn\_rinjani  
 rinjaninationalpark.id  
 +62811283939



---

Dalam pengelolaan wisata di TN Gunung Rinjani telah disusun SOP Pendakian, SOP Pengelolaan sampah dan SOP evakuasi. SOP Pendakian telah cukup baik mengatur pendaki dengan adanya sanksi berupa *blacklist*, hanya saja dalam penerapannya masih belum optimal terkait pelaporan saat *cek out* antara kepatuhan pendaki maupun petugas dipintu pendakian.

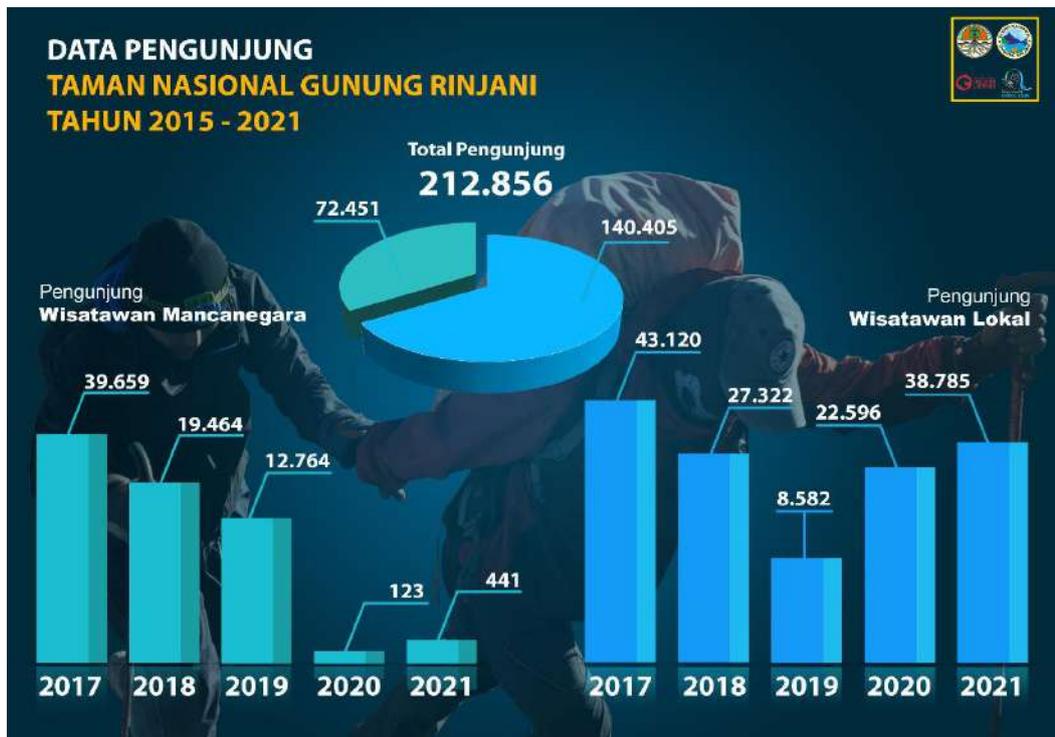
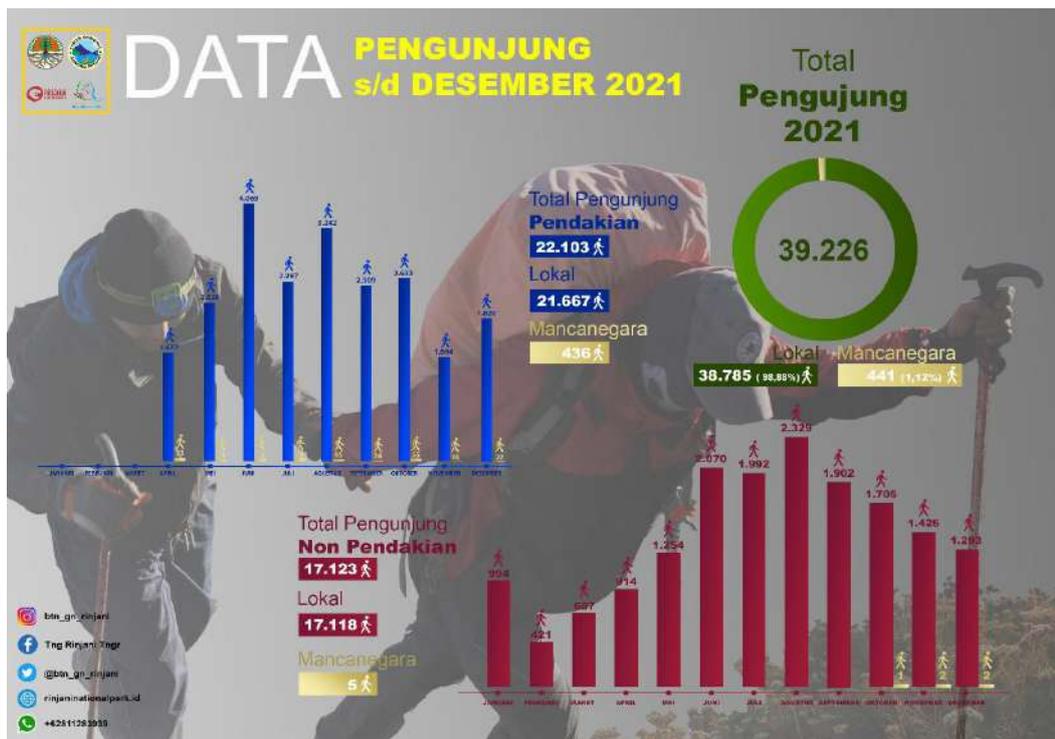
Untuk menjamin keselamatan pengunjung terutama pada jalur pendakian telah ada aplikasi pemantauan pendaki, asuransi, SOP evakuasi, sign board sepanjang jalur dan perbaikan jalur pendakian. Pada kasus kecelakaan pengunjung yang masih terjadi pada 2021 telah dilakukan perbaikan jalur. Tentunya dalam pengembangan wisata tidak lepas dari masalah sampah. TNGR saat ini sudah ada kebijakan pengelolaan sampah berupa pack in dan pack out di pintu masuk maupun pintu keluar pendakian, serta adanya sanksi black list bagi pengunjung yang tidak membawa sampahnya turun.

#### **4.3.1. Pengunjung Destinasi Wisata**

Total pengunjung tahun 2021 adalah sebanyak 39.226 orang dengan rincian; 38.785 orang pengunjung lokal dan 441 orang pengunjung mancanegara. Pengunjung lokal masih mendominasi dengan persentasi 98,88% sedangkan mancanegara 1,12%. Jika dilihat dari kategori destinasi, Pengunjung pendakian tahun 2021 berjumlah 22.103 orang dengan rincian 21.667 pengunjung lokal dan 436 pengunjung mancanegara sedangkan Pengunjung non pendakian tahun 2021 berjumlah 17.123 orang dengan rincian 17.118 orang pengunjung lokal dan 5 orang pengunjung mancanegara.

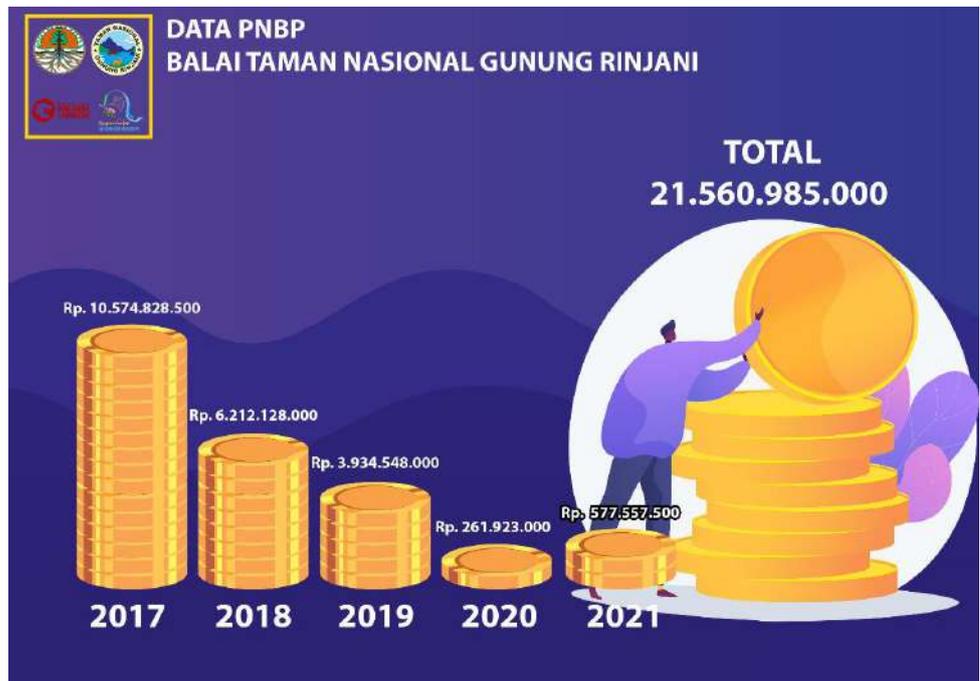
Untuk Tren kunjungan pendakian pada tahun 2021 mengalami fluktuatif dengan kunjungan bulan Juni menjadi kunjungan tertinggi sedangkan Tren kunjungan non pendakian pada tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan pada pertengahan tahun dengan jumlah kunjungan tertinggi pada bulan Agustus.

Jika dibandingkan dengan kunjungan tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 0,72%.



**4.3.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Total PNBP tahun 2021 adalah berjumlah Rp.577.577.599 dengan rincian Rp. 402.687.500 penerimaan dari pengunjung lokal, Rp.135.000.000 penerimaan dari pengunjung mancanegara dan Rp. 39.870.000 dari penerimaan lainnya. Jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 108,79%.

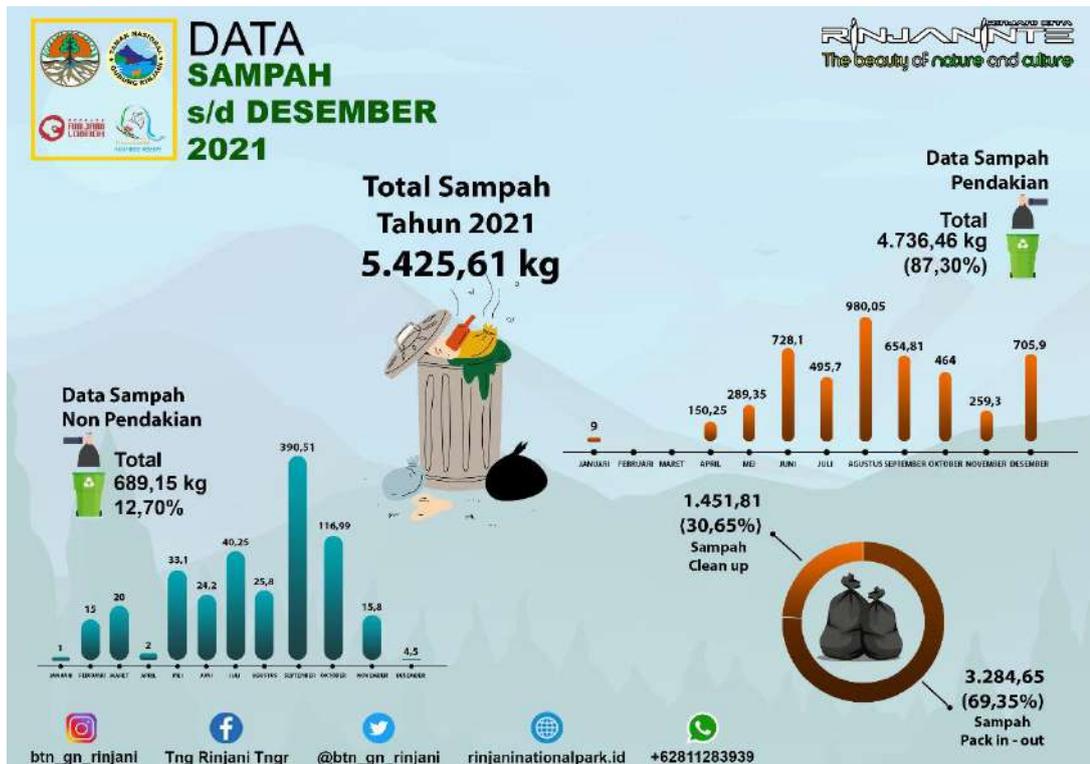


### 4.3.3. Pengelolaan Sampah Destinasi Wisata

Total sampah tahun 2021 adalah 5.425,61 kg dengan rincian; 4.736,46 kg atau 87,30% sampah pendakian dan 689,15 kg atau 12,70% sampah non pendakian.

Penanganan sampah di TN Gunung Rinjani dilakukan dengan 2 metode/cara yakni pack in pack out dan clean up, dimana sampah dari kegiatan pack in pack out sebesar 3.284,65 kg (69,35%) dan sampah dari kegiatan clean up 1.451,81 (30,65%).

Untuk Tren timbulan sampah pada kegiatan pendakian dengan jumlah timbulan sampah tertinggi pada bulan Agustus sebesar 980,05 kg dan tren timbulan sampah pada kegiatan non pendakian dengan jumlah timbulan sampah tertinggi pada bulan September sebesar 390,51 kg. Jika dibandingkan dengan data timbulan sampah pada tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 2,69%.





**Sasaran kegiatan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.**



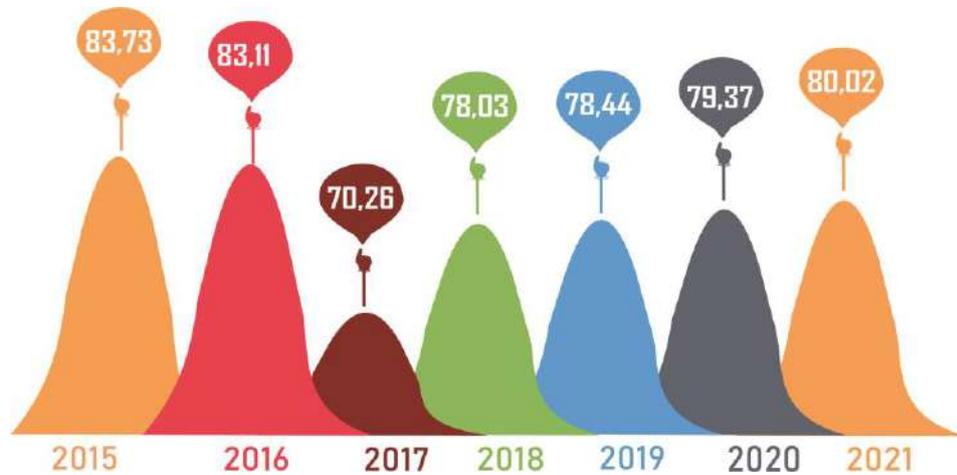
### 5.1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan evaluasi atas penerapan SAKIP pada Ditjen KSDAE. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Berdasarkan Surat



Inspektur Jenderal Kementerian LHK SP.64/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/4/2021 tanggal 4 April 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 80,02 dengan kategori A (Memuaskan) atau tercapai 101,94% dari target 78,5.

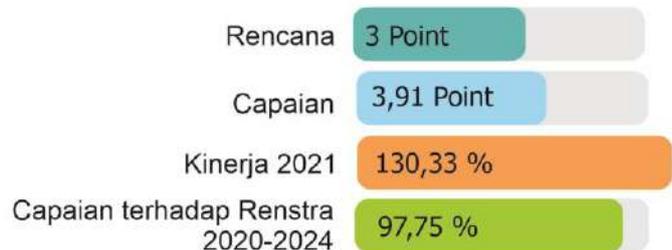
Penilaian tsb dilakukan terhadap 5 komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja, dan Pencapaian kinerja.



Jika dilihat sejak tahun 2017 nilai SAKIP Ditjen KSDAE terus mengalami peningkatan setiap tahunnya

## 5.2. Level Maturitas SPIP

Tingkat maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan gambaran mengenai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Nomor S.1299/SETJEN/ROCAN/SET.1/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Matrik Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup KLHK Tahun 2021, bahwa Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,910 ada peningkatan sebesar 0,552 point dibanding tahun 2020 yang sebesar 3,358 point.

## B. Realisasi Anggaran

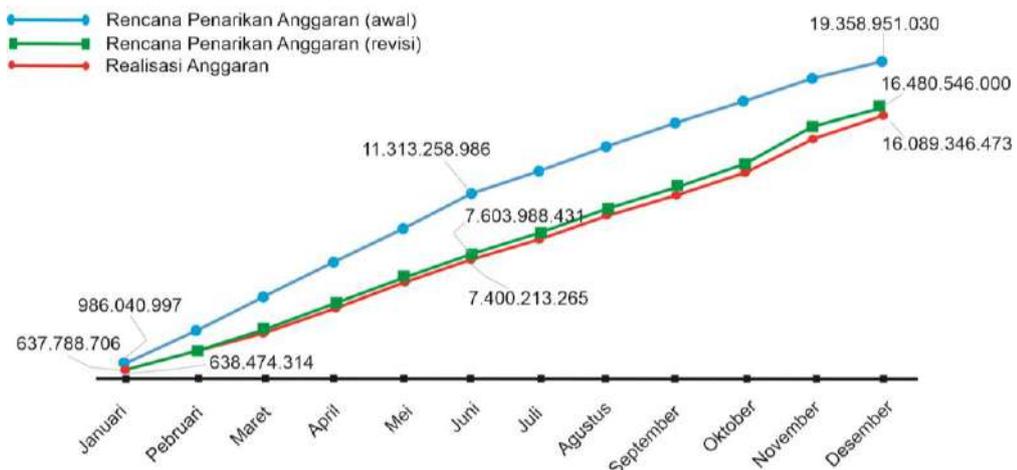
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Renstra 2020-2024, dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yakni Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 5 (lima) kegiatan yakni (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (2) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (3) Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru (4) Konservasi Spesies dan Genetik dan (5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

Pagu anggaran awal TN Gunung Rinjani pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 19.547.000.000. Pada 27 Juli 2021 berdasarkan memorendum Direktorat Jenderal KSDAE nomor M.5/KSDAE/SET.3/REN.2/7/2021 TN Gunung Rinjani mendapat mandat untuk penghematan pagu anggaran (refocusing) sehingga anggaran yang tersedia menjadi Rp. 16.480.546.000,- atau berkurang sebanyak Rp. 3.066.454.000 yang difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid-19.

Melalui berbagai langkah strategis dan upaya percepatan pelaksanaan anggaran, TN Gunung Rinjani berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 97,63% atau sebesar Rp.16.089.346.473.

Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020, realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 0,12%.

Perkembangan realisasi anggaran TN Gunung Rinjani tahun anggaran 2021 Per Bulan



Rincian Realisasi penyerapan anggaran DIPA Balai TN Gunung Rinjani tahun 2021 berdasarkan Jenis Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan Tahun 2021

NO	Kode   Nama Kegiatan	Total Pagu	Total Realisasi	%	
				2021	2020
1	<b>5419</b>   Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	11.306.050.000	10.929.090.961	96.67	95.93
2	<b>5420</b>   Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	508.670.000	508.518.700	99.97	98.84
3	<b>5421</b>   Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	2.296.636.000	2.286.331.731	99.55	98.49
4	<b>5422</b>   Konservasi Spesies dan Genetik	340.000.000	339.908.397	99.97	99.93
5	<b>5423</b>   Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	2.029.190.000	2.025.496.684	99.82	99.07
<b>JUMLAH</b>		<b>16.480.546.000</b>	<b>16.089.346.473</b>	<b>97.63</b>	<b>97,51</b>

Tabel 8 : Rekapitulasi Pencapaian Realisasi Anggaran BTNGR Tahun 2021 (ber-dasarkan jenis belanja)

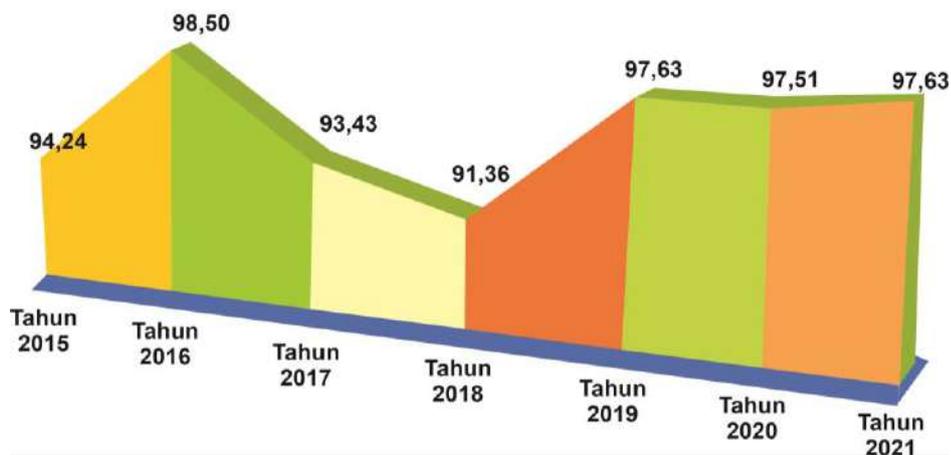
Jenis Belanja	Realisasi 2021			% 2020
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai (51)	8,166,520,000	7,793,026,605	95.43	94,91
Belanja Barang (52)	8,169,496,000	8,152,064,868	99.79	98,25
Belanja Modal (53)	144,530,000	144,255,000	99.81	99,75
<b>JUMLAH</b>	<b>16,480,546,000</b>	<b>16,089,346,473</b>	<b>97.63</b>	<b>97,51</b>

Dari Tabel 8 tersebut di atas terlihat bahwa pencapaian realisasi anggaran TNGR tahun 2021 cukup tinggi, yakni sebesar 97,63%. Serapan anggaran ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 ada peningkatan sebesar 0,12%. Realisasi tertinggi serapan anggaran Tahun 2021 adalah pada jenis Belanja Modal sebesar 99,81% sedangkan realisasi serapan anggaran terendah pada Belanja Pegawai yakni sebesar 95,43%

Tabel 9 : Rekapitulasi Pencapaian Realisasi Anggaran BTNGR Tahun 2021  
(ber-dasarkan sumber dana)

Jenis Belanja	TA. 2020			% 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
Rupiah Murni (RM)	14.015.546.000	13.635.959.793	97.29	97,35
PNBP	2.465.000.000	2.453.386.680	99.53	98,15
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16,480,546,000</b>	<b>16,089,346,473</b>	<b>97.63</b>	<b>97,51</b>

Dari tabel 10 diatas terlihat bahwa realisasi anggaran TNGR Tahun 2021 sumber dana RM mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2020 sedangkan realisasi anggaran sumber dana PNP mengalami peningkatan dibanding tahun 2020.



Jika dilihat dari gambar diatas, Capaian realisasi anggaran TNGR menunjukkan tren kinerja yang baik dimana capaian 3 (tiga) tahun kebelakang pada nilai diatas 97%. Sisa anggaran yang tidak dapat diserap pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.391.199.527,- lebih sedikit dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.685.446.944,- sisa anggaran yang tidak dapat diserap cukup besar dikarenakan terdapat sisa anggaran mati pada mata anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.373,493,395,- yakni tidak terbayarkannya gaji pegawai ke-14.

## Evaluasi EKA SMART dan IKPA OMSPAN



### Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA SMART)

Nilai Evaluasi kinerja anggaran (EKA SMART) merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran. EKA menggambarkan kualitas unit kerja organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja. Komponen pembentuk nilai EKA Satker adalah : Capaian Keluaran Program, Capaian Sasaran Program, Serapan Anggaran, Konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana, Efisiensi. Pada tahun 2021 Nilai EKA Balai TNGR sebesar 88,84.

### Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA OMSPAN)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu kerja. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu : kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Dari aspek tersebut kemudian diukur melalui 12 indikator penilaian. Pada tahun 2021 Nilai IKPA Balai TNGR Sebesar 95,79 dari nilai maksimal 100



## SEJARAH EVOLUSI GEOLOGI RINJANI

**Kaldera Gunung Rinjani** dengan diameter 2,4 X 4,8 km (data dasar Gunung Api Indonesia) yang berbentuk elips merupakan kaldera gunung api aktif tertinggi di Indonesia. Bentang alam bernilai estetika tinggi ini terbentuk dari rangkaian letusan sangat dahsyat atau "PAROKSIMAL" Gunung Samalas tahun 1257 pada 7 skala Volcanic Explosivity Index (VEI), yang dampaknya melanda hingga Eropa. Hal ini baru diungkapkan pada abad-21 oleh Permadi, Manullang dan Rachmat.

Tahap pra letusan Samalas abad 13 terdapat dua kerucut gunung api yaitu Gunung Samalas dan gunung api Rinjani dengan kaldera ter pisah.

Tahap pasca letusan Samalas ditandai dengan aktivitas vulkanik dalam kaldera berupa gunung api aktif Baru Jari (Dokumen Usulan Geopark Internasional, 2014).

Menurut penelitian Lavigne dkk. pada tahun 2013, letusan tersebut mengeluarkan 40 km<sup>3</sup> material dengan kolom letusan mencapai 43 km ke atmosfer.

Letusan Samalas tersebut diperkirakan merupakan **letusan gunung api terbesar** dalam 7.000 tahun terakhir, sekitar 2 kali lebih besar dari letusan Tambora pada tahun 1815 dan 8 kali lebih besar dari letusan Krakatau pada tahun 1883. Sebelum letusan ini Gunung api Samalas diperkirakan memiliki ketinggian **4200 mdpl.**

Foto by Wibbi Marki



btn\_gn\_rinjani



Tng Rinjani Tngr



@btn\_gn\_rinjani



rinjaninationalpark.id



+62811283939

---

## **BAB. IV**

# **Penutup**

---

Laporan Kinerja TNGR Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban TNGR terhadap publik pada umumnya dan kepada Direktorat Jenderal KSDAE pada khususnya atas Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani bersama. Tahun 2021 merupakan tahun kedua periode Renstra 2020-2024, yang pengukurannya dijabarkan dalam 5 sasaran kegiatan yang diuraikan dalam 11 (delapan) indikator kinerja kegiatan (IKK).

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, pencapaian kinerja TN Gunung Rinjani pada tahun ini secara keseluruhan adalah sebesar 119,79 % atau mengalami peningkatan 17,16% dibandingkan periode tahun 2020 dengan dicapai sebesar 102,63%.

Pelaksanaan kegiatan ini telah didukung dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.16.480.546.000, dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 16.089.346.473,- atau 97,63%. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja, didapatkan rasio efisiensi sebesar 0,82 dimana apabila angka efisiensi kurang dari 1 termasuk kategori efisien, sehingga penggunaan anggaran pada TN Gunung Rinjani efisien terhadap capaian kinerja

Laporan Kinerja TNGR tahun 2021 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja TN Gunung Rinjani secara memadai kepada publik khususnya pada Direktorat Jenderal KSDAE dan para pemangku kepentingan di TN Gunung Rinjani, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.

---

# lampiran

---





## Lampiran 1

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Asriady, S.Si., M.P.  
Jabatan : Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

Berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Agustus 2021

Kepala Balai



Dedy Asriady, S.Si., M.P.

NIP. 19740818 200003 1 001



## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

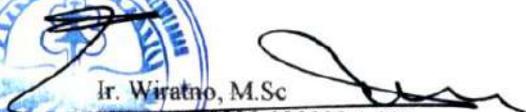
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Asriady, S.Si., M.P.  
Jabatan : Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc  
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
Ir. Wiratno, M.Sc  
NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, Agustus 2021  
Pihak Pertama,  
  
Dedy Asriady, S.Si., M.P.  
NIP. 19740818 200003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Unit Satuan Kerja : Balai Taman Nasional Gunung Rinjani  
Tahun Anggaran : 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET
1	Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif didalam kawasan konservasi kumulatif (hektar)	5420.QMA.001 – Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	19.064,75 Hektar
2	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (hektar)	5421.AED.001 – Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan	100 hektar
		Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	5421.BDB.001 – Fasilitas Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	5 Desa
		Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengeloalaannya	5421.PBV.006 – Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengeloalaannya	1 Unit KK
		Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (PEN)	5421.PBV.007 – Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	13 hektar
		Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengeloalaannya (PEN)	5421.PBV.008 – Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengeloalaannya	1 Unit KK
3	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam dan luar kawasan konservasi	5422.PBJ.001 – Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	19.064,75 hektar
4	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	5423.QAH.001 – Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	1 Entitas
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka Ekowisata	5423.QDD.001 – Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE dan Bahari)	2 Kelompok Masyarakat
		Jumlah destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan	5423.RAG.001 – Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	1 Unit

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET
		Jumlah destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan (PEN)	5423.RAG.005 – Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	1 Unit
7	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	5419.EAA.994 – Layanan Perkantoran	1 Layanan
			5419.EAC.970 – Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
			5419.EAD.001 – Layanan Sarana Internal	1 unit

Kegiatan :

Anggaran :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam  | : | Rp. 508.670.000,- (Lima ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)                                    |
| 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi  | : | Rp. 2.296.636.000,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)        |
| 3. Konservasi Spesies dan Genetik  | : | Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah)  |
| 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi  | : | Rp. 2.029.190.000,- (Dua milyar dua puluh sembilan juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah)                      |
| 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem | : | Rp. 11.306.050.000,- (Sebelas milyar tiga ratus enam juta lima puluh ribu rupiah)                                 |
| Total Anggaran :   | : | Rp. 16.480.546.000,- (Enam belas milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam rupiah rupiah) |

  
 Direktur Jenderal,  
 Wiranto, M. Sc.  
 NIP. 19620328 198903 1 003

  
 Kepala Balai  
 De Wicakanto, S.Si, M.P.  
 NIP. 19740818 200003 1 001

Agustus 2021

## Lampiran 2

### Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 BTNGR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Realisasi	Prosen tase
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (kumulatif)	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	19.064,75 hektar	19.064,75 hektar	100
2.	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan open area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	100 hektar	189,47 hektar	150
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	5 desa	7 desa	140
		Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 unit KK	1 unit KK	100
		Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangan	Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	13,00 hektar	0,00 hektar	0
3.	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	luas kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	19.064,75 hektar	19.064,75 hektar	100

1	2	3	4	5	6	7
4.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam.	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	1 entitas	2 entitas	150
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka ekowisata.	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	2 kelompok masyarakat	3 kelompok masyarakat	150
		Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	1 unit	1 unit	100

**Capaian Kinerja Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Tahun 2021**

**110,00%**



### Lampiran 3

## Matriks Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024

Satuan Kerja : **BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/ IPK/IKK	SATUAN	TARGET KINERJA					KOMPONEN
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>029.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
<b>5419</b>	<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem</b>							
5419.01	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE							
01.01	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	Poin	78	78,5	79	79,5	80	a. Penyusunan Program dan Anggaran b. Evaluasi dan Pelaporan c. Data, Sistem Informasi dan Kehumasan d. Hukum dan Kerjasama Teknik e. Kepegawaian dan Ortala f. Pengelolaan Jabatan Fungsional g. Keuangan dan Perlengkapan h. Tata Usaha Pimpinan
01.02	2. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	4	
01.03	3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Opini WTP	1	1	1	1	1	
<b>029.FF</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>							
<b>5420</b>	<b>Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>							
5420.01	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/ IPK/IKK	SATUAN	TARGET KINERJA					KOMPONEN
			2020	2021	2022	2023	2024	
01.01	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	Hektar	7.769	19.064	24.064	29.064	33.562	a. Desain Inventarisasi Kehati Nasional b. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK c. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan d. Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi
5420.02	Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas							
02.03	2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	1	1	1	1	1	a. Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi b. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi c. Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi
<b>5421</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>							
5421.01	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi							
01.01	1. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	5	15	25	35	35	a. Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK b. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK
01.04	2. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Hektar	90	190	240	290	340	a. Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi b. Pemberian akses kelola kepada masyarakat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/ IPK/IKK	SATUAN	TARGET KINERJA					KOMPONEN
			2020	2021	2022	2023	2024	
5421.02	Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati							
02.02	3. Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Hektar	300	370	435	500	546	a. Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi b. Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa
5421.03	Sasaran Kegiatan 3: Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi							
03.03	4. Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	1	1	1	1	1	
<b>5422</b>	<b>Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik</b>							
5422.01	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan kehati di dalam dan di luar kawasan konservasi							
01.01	1. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam dan diluar kawasan konservasi	Juta Hektar	12.256	31.320	34.320	37.320	40.320	
<b>5423</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Kawasan Konservasi</b>							
5423.01	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan							
01.01	1. Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Destinasi	1	1	1	1	1	
01.02	2. Jumlah unit pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam	Entitas	1	1	1			